

---

## **Analisis Stealth Conflict : Dampak Kebijakan Strategi Keamanan Indonesia Dalam Konflik Papua Barat**

---

**Submisi Artikel :**

20 Agustus 2023

**Diterima :**

20 September 2023

**Publikasi :**

30 Maret 2024

**Edisi Jurnal :**

Volume 1, Nomor 1

**Bulan/Tahun Edisi :**

Oktober 2023 – Maret 2024

**Kata kunci :**

*Konflik Siluman,  
Kebijakan Keamanan,  
Media Massa,  
Masyarakat  
Internasional.*

**Lenbaga Pengelola Jurnal  
& Penerbit**

**Pengelola dan Penerbit  
Cetak oleh Fakultas Ilmu  
Sosial Dan Ilmu Politik  
(FISIP).**

**Penerbit Online (OJS3)  
Lembaga Riset Dan Inovasi  
(LeRIN) – Universitas  
Dayanu Ikhsanuddin.**

Alamat : Universitas Dayanu  
Ikhsanuddin. Jalan Dayanu  
Ikhsanuddin No. 124, Kode  
Pos 93721 Baubau, Sulawesi  
Tenggara, Indonesia.

Email:

[jurnalbarataind@gmail.com](mailto:jurnalbarataind@gmail.com) |

Kontak Pengelola :

+62 821-2368-6708

\*Claudia Syarifah

Universitas Wahid Hasyim Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

[claudiasyarifah@unwahas.ac.id](mailto:claudiasyarifah@unwahas.ac.id)

*\*correspondent author*

---

### **ABSTRAK**

Konflik Papua Barat telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan dampak kemanusiaan yang signifikan terhadap masyarakat Papua Barat. Namun, perhatian masyarakat internasional terhadap konflik ini terbatas, dan ini mengundang pertanyaan mengapa konflik ini diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mungkin menjadi alasan mengapa masyarakat internasional mengabaikan konflik Papua Barat. Indonesia, dengan kebijakan strategis keamanannya menentukan sejauh mana konflik Papua Barat mendapatkan perhatian internasional, dan hal ini dapat menjelaskan mengapa konflik ini sering dianggap sebagai “stealth conflict” yang kurang mendapat perhatian yang seharusnya dari masyarakat internasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur komprehensif. Hasil analisis menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan perhatian terhadap konflik ini, termasuk kepentingan nasional, kedekatan geografis, kemampuan untuk mengidentifikasi, kemampuan untuk bersimpati, kerumitan konflik, dan kurangnya sensasionalisme. Terdapat juga dampak dari kebijakan non-intervensi dalam konflik ini. Sebagai hasilnya, konflik Papua Barat cenderung kurang dikenal di arena internasional daripada diabaikan, dan kompleksitas serta ketidakpastian konflik mempengaruhi minat masyarakat internasional untuk terlibat. Kesimpulannya, upaya untuk mendapatkan perhatian internasional terhadap konflik Papua Barat harus memperhitungkan faktor-faktor ini dan bekerja menuju pemahaman yang lebih baik tentang situasi di Papua Barat.

## PENDAHULUAN

Konflik Papua Barat telah berlangsung selama beberapa dekade. Sampai hari ini jumlah korban tewas diperkirakan lebih dari sebanyak 500.000 orang Papua (Indahono, 2020). Meskipun konflik ini memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Papua Barat, kehadiran dan perhatian masyarakat internasional terhadap konflik ini masih terbatas. Masyarakat internasional secara umum memiliki peran penting dalam mendorong perdamaian dan memperhatikan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai wilayah dunia. Namun, dalam konteks konflik Papua Barat, tampaknya ada ketidaksetaraan dalam perhatian yang diberikan oleh masyarakat internasional dibandingkan dengan konflik-konflik serupa di tempat lain.

Beberapa media massa salah satunya *The Conversation* menyebut konflik Papua Barat sebagai “*forgotten conflict*” dalam judul lengkap “*Fight for freedom: new research to map violence in the forgotten conflict in West Papua*” (Indahono, 2020). Sebelumnya DW (12/10/2018) juga memuat berita dengan judul “*Papua Killing Revive Forgotten Conflict*”. Artikel tersebut memuat analisis bahwa perilaku pemerintah Indonesia mengabaikan substansi konflik di Papua seperti sejarah konflik yang panjang, pembangunan infrastruktur kontroversial, tuntutan otonomi yang belum terpenuhi, dan keprihatinan atas

pelanggaran hak asasi manusia (Purwaningsih, 2018).

Tidak hanya media asing, surat kabar nasional Indonesia *The Jakarta Post* juga menyebut konflik di Papua Barat sebagai konflik yang terlupakan, “*Fight for Freedom: New Research to Map Violence in the Forgotten Conflict in West Papua*” (23 Mei 2020). Dalam artikel tersebut mengulas berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi informasi tentang konflik di Papua untuk menjadi pusat perhatian. Berbagai faktor, seperti pembatasan media, pelarangan jurnalis asing, dan penolakan pemerintah Indonesia terhadap permintaan PBB untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, yang telah menyebabkan kurangnya perhatian internasional terhadap konflik tersebut (Wright, 2020). Dalam beberapa kasus, tindakan-tindakan seperti pembatasan media dapat dianggap sebagai upaya untuk mengendalikan narasi dan informasi yang keluar dari wilayah konflik (Wright, 2020).

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis faktor-faktor yang mungkin menjadi alasan mengapa masyarakat internasional mengabaikan konflik Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ketidaksetaraan perhatian yang diberikan kepada konflik ini dan implikasinya terhadap upaya penyelesaian konflik dan pemulihan di wilayah Papua Barat.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, muncul pertanyaan mengapa masyarakat internasional mengabaikan konflik Papua Barat, meskipun konflik ini melibatkan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia dan gejala kekerasan yang berkelanjutan.

Telah banyak penelitian terdahulu mengenai konflik di Papua Barat. Tidak hanya akademisi yang berasal dari Indonesia maupun Australia dan negara-negara Pasifik, bahkan akademisi dari Inggris dan Amerika Serikat telah menerbitkan beberapa karya terkait konflik Papua Barat. Adapun publikasi terkait konflik Papua Barat dapat dikategorikan ke dalam empat fokus. Pertama, fokus tentang pelanggaran HAM di Papua Barat, terdapat banyak sekali yang menulis tentang ini dan semuanya sepakat bahwa apa yang terjadi di Papua Barat merupakan pelanggaran HAM.

Kedua, penelitian yang berfokus tentang gerakan kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri, seperti karya *Pemetaan Peran & Kepentingan Para Aktor Dalam Konflik di Papua* (Elisabeth, 2004); *Protection and Empowerment of the Rights of Indigenous People of Papua (Irian Jaya) Over Natural Resources Under Special Autonomy : from Legal Opportunities To The Challenge Of Implementation* (Sumule, 2004); *Jeritan Bangsa : Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan* (Wonda & Yoman, 2009); *In Defence of The Papua Sympathisers: A Rejoinder to Ed Aspinall* (King, 2006); *The*

*Emergence of Papuan Tribal Governance: A case study of societal knowledge creation* (Wibowo, 2005); *A Brief Survey of the Land and People on the Northeast Coast of New Guinea* (Godschalk, 2010); dan *Pergerakan Sakralitas-Nasionalisme Papua: Pola Pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua dalam Ruang Solidaritas di Yogyakarta* (Hutubessy, 2019). Ketiga, penelitian yang berfokus pada upaya resolusi konflik juga tidak sedikit diantaranya *Papua, Land of Peace: Addressing Conflict Building Peace in West Papua* (Hernawan, 2005) dan *The prospect of mediation in West Papua-Indonesia Conflict transformation* (Viartasiwi, 2013). Keempat, penelitian tentang dinamika politik Papua Barat sebagaimana yang dilakukan (Chauvel, 2021) dalam *West Papua: Indonesia's last regional conflict*.

Literatur sebelumnya tentang Papua Barat sangat membantu penulis dengan memberikan gambaran yang memadai tentang konteks historis dan kondisi terkini Papua Barat. Namun, dari berbagai literatur yang ada mengenai Papua Barat menunjukkan kecenderungan para peneliti untuk mengulangi apa yang telah dibahas selama bertahun-tahun. Tidak ada keraguan bahwa dunia akademis setuju bahwa situasi di Papua Barat patut mendapat perhatian internasional. Akan tetapi terdapat kepingan *puzzle* yang hilang yakni analisis tentang mengapa perhatian internasional tampak begitu sulit untuk didapatkan oleh Papua Barat. Oleh karenanya

tulisan dibuat sebagai upaya untuk mengisi kesenjangan teoritis tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif tentang konflik Papua Barat dan peran masyarakat internasional dalam menanggapi konflik ini. Faktor-faktor yang akan dieksplorasi termasuk geopolitik, ketertarikan ekonomi, kepentingan strategis, kekurangan informasi, serta faktor budaya dan historis yang mempengaruhi persepsi dan prioritas masyarakat internasional. Wawancara secara spontan kepada beberapa orang asing juga dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh pengetahuan masyarakat asing terkait konflik Papua Barat. Fokus penelitian terbatas pada alasan mengapa masyarakat internasional mengabaikan konflik Papua Barat, dan tidak akan membahas secara mendalam mengenai dinamika konflik itu sendiri atau upaya penyelesaiannya.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Stealth Conflict**

Analisis tentang konsep "stealth conflict" menggambarkan bagaimana konflik, meskipun memiliki dampak kemanusiaan yang serius, sering kali kurang mendapat perhatian

internasional yang seharusnya (Hawkins, 2016). Dalam analisis Hawkins, institusi, seperti peran negara dan organisasi supra negara sebagai pembuat kebijakan, memainkan peran kunci dalam menentukan sejauh mana konflik tersebut mendapatkan sorotan global (Hawkins, 2016). Kebijakan negara, dalam hal ini kebijakan keamanan, dapat memengaruhi bagaimana isu-isu seperti konflik dianggap penting oleh aktor eksternal di tingkat internasional, seperti negara-negara, organisasi internasional, dan jangkauan media massa. Keputusan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam suatu konflik, memberikan bantuan kemanusiaan, atau bahkan intervensi militer adalah aspek penting dalam agenda-setting global, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat perhatian terhadap isu tersebut di dunia internasional. Dengan demikian, peran negara sebagai aktor utama dalam kebijakan luar negeri dan respons terhadap konflik asing memiliki dampak dalam menentukan apakah suatu konflik masuk dalam kategori "stealth conflict" atau mendapatkan sorotan.

Terdapat berbagai istilah yang sering digunakan untuk menyebut konflik yang kurang menarik perhatian, tidak terlihat atau tidak diketahui, misalnya istilah terlupakan, diabaikan, dan tersembunyi. Istilah 'terlupakan' mungkin paling banyak digunakan dalam menggambarkan konflik yang gagal menarik perhatian internasional. Namun istilah ini agak menyesatkan, karena

untuk menjadi konflik yang terlupakan, maka konflik tersebut harus terlebih dahulu pernah mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, istilah “diabaikan” lebih tepat untuk digunakan, karena artinya keberadaan suatu konflik diketahui, tetapi para aktor sengaja menolak atau enggan memberikan tanggapan terkait konflik itu. Sementara itu, Hawkins lebih suka menggunakan istilah siluman (*stealth*) untuk mengiaskan sifat terselubung yang membuat konflik tertentu menyebabkan kematian dan kehancuran dalam jumlah besar tanpa terdeteksi (Hawkins, 2016).

Banyak sekali konflik yang terjadi di dunia ini pada waktu yang sama, tetapi tidak semua konflik mendapatkan curahan perhatian. Selalu ada proses seleksi dan eliminasi yang tidak dapat dihindari dalam merespon konflik, baik di tingkat individu maupun institusional. Hal ini terjadi karena setiap aktor yang berbeda memiliki ‘minat’ yang berbeda. Namun, Hawkins menyatakan bahwa bahaya besar muncul ketika semua aktor memiliki pilihan yang sama terkait konflik mana saja yang dianggap sebagai prioritas. Ini artinya tidak ada aktor yang berfungsi sebagai pengendali dan penyeimbang. Akibatnya banyak konflik lain yang tidak terpilih akhirnya diabaikan karena tidak ada aktor yang membawanya naik ke atas panggung.

Menurut Hawkins terdapat beberapa factor yang membuat suatu konflik menjadi

terabaikan; (1) Kepentingan nasional/ kepentingan politik; (2) Kedekatan geografis dan akses; (3) Kemampuan untuk mengidentifikasi; (4) Kemampuan untuk bersimpati; (5) Simplicity; dan (6) Sensationalism (Hawkins, 2016).

Pertama, faktor nasional/ kepentingan politik. Negara-negara selama ini didominasi oleh ideologi nasionalisme karena itu kepentingan nasional merupakan faktor paling penting dalam menentukan apakah konflik di negara lain akan mendapat perhatian atau tidak. Kepentingan militer dan ekonomi merupakan pertimbangan utama negara. Maka dari itu, apabila suatu konflik secara signifikan mempengaruhi kepentingan nasional negara lain, terdapat kemungkinan konflik tersebut akan mendapat perhatian internasional.

Disamping itu, konflik Papua Barat kurang mengancam negara-negara tetangga baik melalui isu pengungsi atau pengaruh ekonomi atau fisik lainnya. Kebijakan luar negeri negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Selandia Baru menunjukkan pola yang mirip dalam mengelola isu Papua Barat yakni memilih untuk tidak pernah secara langsung atau spesifik mengkritik Indonesia atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Perlu diingat bahwa Indonesia memainkan peran penting dalam perang melawan terorisme. Sejak kasus Bom Bali pada tahun 2002,

negara-negara Barat, terutama pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah mensponsori pasukan kontraterorisme Indonesia “Detasemen 88”. Belakangan pasukan ini juga digunakan untuk melawan separatis Papua Barat yang oleh pemerintah Indonesia dicap sebagai kelompok kekerasan bersenjata. Penulis berasumsi bahwa kemungkinan bahwa negara-negara tidak ingin mengambil risiko terkait kepentingan strategis suatu negara, mereka segan dengan Indonesia apabila membuat kebijakan untuk mendorong pemerintah untuk menyelesaikan konflik.

Terlalu dangkal untuk menyebutkan bahwa konflik di Papua adalah konflik separatisme. Sejatinya, konflik di Papua Barat adalah persoalan investasi bahkan dapat dikatakan sebagai kutukan sumber daya alam yang melibatkan banyak aktor. Tidak hanya pemerintah Indonesia yang mendapat manfaat dari tanah Papua Barat yang kaya, perusahaan-perusahaan asing berbaris untuk berinvestasi di wilayah ini. Ketimpangan pembangunan, tersisih dari derasnya arus migran, serta adanya kontrol kekuasaan yang diikuti dengan kurang selarasnya kebijakan dengan budaya lokal, akhirnya melahirkan perasaan bahwa orang Papua menjadi asing di tanah sendiri. Kasus seperti Freeport, MIFEE, dan kebebasan pers di tanah Papua, menjadi contoh betapa masih akutnya intimidasi dan diskriminasi yang dialami rakyat Papua. Sebagaimana teori ‘Relative Deprivation’ yang diperkenalkan oleh Ted Robert Gurr bahwa sumber konflik

adalah tidak bisa ditoleransinya perasaan deprivasi (Gurr, 1970) seperti yang dialami oleh rakyat Papua dalam berhadapan dengan kebijakan pemerintah, juga sebaliknya pemerintah terhadap rakyat Papua. Rasa terampasnya hak masyarakat Papua terutama di tanah kelahirannya, membawa mereka pada tumbuhnya perasaan diabaikan baik dalam kondisi ekonomi dan politik yang akhirnya memilih jalan konflik dan membentuk ketidakamanan di wilayah tersebut.

Sampai hari ini Freeport dan perusahaan lain aktif di Papua Barat mempekerjakan pasukan keamanan Indonesia untuk menjaga operasi mereka. Mereka adalah pasukan yang sama yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat. Penulis khawatir dengan kemungkinan dipeliharanya konflik di Papua Barat agar pasukan keamanan Indonesia dapat masuk ke daerah-daerah disana dengan tujuan mengamankan bisnis para elit.

Apabila merujuk kepada teori Hawkins, maka kepentingan nasional pemerintah Indonesia adalah untuk menjauhkan fokus dunia internasional terhadap Papua Barat, karena akan merepotkan jika konflik ini mendapat perhatian lebih lanjut di seluruh dunia. Kekayaan sumber daya alam dengan demikian dapat dilihat sebagai kutukan daripada berkah bagi orang Papua, karena sumber daya ini secara efektif membuat Negara-negara di seluruh dunia terlibat dalam

perselisihan. Papua Barat sering digambarkan sebagai kasus yang sangat kompleks sehingga menimbulkan rendahnya kemauan politik untuk menyelesaikan persoalan ini. Dibalik gagasan populer tentang ‘kurangnya kemauan politik’ terdapat faktor-faktor aktual yang tersembunyi menjelaskan mengapa *good will* itu tidak ada. Komunitas internasional bukan hanya negara-negara; tetapi juga mengacu pada organisasi regional dan internasional seperti PBB. Penting untuk menekankan bahwa organisasi internasional tidak ada dalam ruang hampa; mereka diciptakan oleh Negara untuk Negara dan kepentingan nasional / politik pemerintah dengan demikian tidak dapat dihindari mengatur agenda untuk tindakan internasional pada konflik seperti yang ada di Papua Barat.

Kedua, faktor kedekatan geografis dan akses; Konflik Papua Barat kemungkinan besar terabaikan karena lokasi geografis dan akses yang terbatas. Hutan Papua yang sangat lebat membuatnya susah untuk diakses. Bagi negara-negara Barat seperti AS dan negara-negara Uni Eropa, konflik ini terletak terlalu dari pandangan mata masyarakat maupun pembuat kebijakan. Namun kita dapat melihat peningkatan perhatian terhadap konflik di kawasan Pasifik, dan ini kemungkinan terjadi karena faktor kedekatan wilayah. Jika saja konflik semakin intensif dan ribuan pengungsi mencoba menyeberangi perbatasan Australia dan PNG, baik pemerintah Australia maupun PNG dan warganya kemungkinan besar akan

lebih memperhatikan konflik tersebut. Selain itu, minimnya akses untuk terhubung dengan lokasi sektor tertentu, seperti media komunikasi. Pemerintah Indonesia telah berhasil secara efektif mengisolasi Papua Barat dengan membatasi akses ke media. Selama ini media Sebagian besar terpusat di Jakarta. Tidak boleh ada stasiun media internasional yang berbasis di Papua Barat. Belum ada ‘efek netizen’ yang membantu orang Papua dalam perjuangan mereka.

Pembatasan hukum yang mengharuskan orang asing untuk mengajukan izin perjalanan khusus untuk mengunjungi banyak daerah di Papua Barat membuatnya semakin sulit bagi orang untuk mendapatkan informasi tentang situasi tersebut. Hal ini menciptakan kesan bahwa ada sesuatu yang serius salah terjadi di wilayah tersebut. Tanpa kebijakan ini, nuansa konflik mungkin akan turut muncul mewarnai pandangan masyarakat internasional terhadap Indonesia. Kendatipun konflik ini diketahui oleh beberapa akademisi di luar negeri, tetapi untuk memperoleh akses terhadap pengetahuan tersebut masih terbatas.

Ketiga, kemampuan untuk mengidentifikasi, ini mengacu pada kemampuan untuk mengenali dan memahami aktor, tujuan, motif, tindakan, strategi, dan dinamika yang terlibat dalam konflik tersebut. Dalam kasus konflik di Papua Barat, kemampuan untuk mengidentifikasi akan melibatkan pemahaman yang mendalam

tentang berbagai kelompok yang terlibat dalam konflik, seperti pemerintah Indonesia, gerakan separatis Papua, komunitas adat, dan kelompok kepentingan lainnya. Kemampuan untuk mengidentifikasi dengan korban konflik mempengaruhi tingkat perhatian konflik. Di beberapa bagian dunia, Papua Barat tidak pernah ada dalam kesadaran masyarakat, maka sangat mungkin informasi apa pun yang datang kepada seseorang akan diabaikan begitu saja. Proses berkelanjutan tentang apa yang harus diperhatikan atau tidak dengan demikian juga secara tidak sadar dapat ditentukan kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi. Hal ini tidak hanya berlaku untuk publik, tetapi juga para pembuat kebijakan.

Keempat, kemampuan untuk bersimpati dalam kasus ini sangat dipengaruhi oleh framing media massa. Berita tentang Papua Barat seringkali tidak proporsional baik di media Indonesia maupun internasional. Media massa didominasi oleh berita-berita yang bersumber dari pemerintah, aparat dan kepolisian. Berita dari sudut pandang Papua Barat sangat sedikit sekali. Semua ini diperparah dengan persetujuan pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) atas pembatasan pemberitaan media massa asing dan nasional tentang Papua Barat (Rizkinaswara, 2019). Menurut Connie Bakrie, pemberitaan yang bernada antagonistik terhadap orang papua justru dibiarkan sehingga bisa menjadi framing untuk

membenarkan tindakan ofensif Militer (Mahendra, 2023). Pembatasan media justru menunjukkan kebijakan keamanan di Papua Barat lebih mendukung pendekatan militeristik dari pada pendekatan dialogis damai. Jika argumen Pemerintah untuk membatasi hoaks, seharusnya negara memfasilitasi media dengan pendekatan jurnalisme damai (*Peace Journalism*). Jurnalisme damai adalah cara melaporkan konflik dengan lebih berfokus pada upaya untuk mengubah konflik menjadi kesempatan untuk perdamaian daripada hanya menggambarkan pertempuran dan kekerasan (Galtung, 2003). Tujuannya adalah untuk menginspirasi solusi damai dan menghindari ruang retorika atau tindakan yang memperburuk situasi konflik. Pendekatan ini bisa menjadi alternatif yang lebih demokratis dan terbuka guna menghasilkan laporan berimbang, mendorong pemahaman tentang konflik, dan cara mencapai perdamaian. Pertukaran informasi yang lebih baik dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar penyebab konflik, solusi potensial, dan peran positif yang dapat dimainkan untuk mencapai perdamaian. Jurnalisme damai juga sebenarnya mempertimbangkan framing, namun untuk mencegah dampak yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap konflik. Perbedaannya adalah lebih fokus pada transformasi konflik dan merombak bingkai pemberitaan yang mungkin bersifat konfrontatif atau sensasionalis. Ini bisa



mengurangi retorika provokatif dan kontribusi negatif terhadap konflik.

### **Perlindungan Isu Konflik di Papua Barat**

Presiden Indonesia Joko Widodo pada 25 Mei 2015 menyatakan memberikan akses media asing ke Papua Barat (BBC Indonesia, 2019). Namun hal itu tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Jurnalis independen lokal yang tinggal di Papua Barat atau menjadi koresponden secara rutin menerima ancaman dari pihak berwenang (The Guardian, 2019). Selain upaya pembatasan aktifitas jurnalis, pengendalian informasi media juga dialami. Faktor utama yang mempengaruhi pengendalian informasi atau pemberitaan di wilayah tersebut adalah kepentingan nasional. Hal ini disebabkan Wartawan lokal dan asing akan melihat militer sebagai ancaman besar bagi problem mendasar atas Papua Barat, seperti narasi-narasi tentang kesejahteraan, kebebasan berekspresi, dan tindakan-tindakan represif yang tidak terukur. Sehingga, pembatasan narasi media arus utama pasti akan menyaring informasi apa yang dianggap relevan oleh pemerintah.

Dalam teori *stealth conflict*, akan mudah bagi seseorang untuk bersimpati kepada korban konflik, ketika salah satu aktor digambarkan sebagai jahat dan yang lain dipandang sebagai baik dan tidak bersalah. Dalam kasus ini, para aktivis Papua Barat

terus-menerus mencoba untuk menggambarkan Indonesia sebagai penjajah, penjahat genosida terhadap orang Papua, tetapi langkah ini belum terlalu berhasil di tingkat internasional. Indonesia justru secara luas dilihat sebagai negara yang berhasil melaksanakan transisi demokrasi dan terbesar secara demografi. Pemerintah Indonesia juga telah berhasil meyakinkan aktor internasional bahwa mereka telah beralih dari pendekatan keamanan ke pendekatan kesejahteraan dan keadilan melalui berbagai program-program pembangunan di seluruh Papua (Krisiandi, 2021).

Masyarakat internasional dengan demikian kemungkinan besar tidak melihat kasus “baik versus jahat” atau narasi “Jakarta versus Papua” dalam konflik Papua Barat. Berbeda dengan Soeharto yang dipersonifikasikan tindakan jahat yang dilakukan terhadap orang Papua, mungkin konflik akan mendapat perhatian lebih. Presiden Indonesia saat ini, Jokowi, sejak kepemimpinannya adalah figur publik yang dipersonifikasikan sebagai tokoh yang membawa perubahan dan kemajuan bagi Papua Barat (Sutrisno, 2020). Langkah-langkah yang diterapkan oleh Indonesia, seperti Undang-Undang Otonomi Khusus, tampaknya cukup untuk mendinginkan pandangan masyarakat internasional terhadap Papua Barat.

Kelima, *simplicity*, teori Hawkins menyatakan bahwa semakin besar kemungkinan para aktor akan mencurahkan perhatian bergantung pada bagaimana aktor memusatkan konflik sebagai perhatian yang berkelanjutan (Hawkins, 2016). Aktor dalam konteks tersebut adalah kombatan gerakan kemerdekaan. Salah satu kebijakan strategi keamanan dalam pendekatan Papua Barat adalah dengan memecah konsentrasi kelompok separatisme. Ini merupakan upaya mengerutkan wilayah geografis keamanan rawan konflik bersenjata dan juga dukungan masyarakat sipil Orang Asli Papua (OAP) terhadap gerakan kemerdekaan dengan cara pemecahan wilayah administrasi Papua barat menjadi beberapa provinsi (CNN Indonesia, 2023), selain karena urusan konsentrasi pembangunan. Konsekuensi dari pemecahan konsentrasi geografi konflik ini adalah terisolasinya wilayah konflik pada daerah tertentu, sehingga gerakan kelompok kombatan tidak merepresentasikan keinginan masyarakat sipil. Jauh sebelum memecahkan konsentrasi konflik secara geografis, langkah Pemerintah sudah melakukan konsentrasi kelompok dari istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Penyebutan istilah dari OPM menjadi KKB adalah salah satu langkah untuk menghindari dibentuknya opini bahwa KKB merupakan sebuah kelompok pemberontak yang kuat dan terorganisir (Widodo, 2023). Sehingga kelompok

kombatan dipandang sebagai kelompok kekerasan yang bersifat sporadis dan tidak merepresentasikan keinginan OAP untuk disintegrasi Papua. Namun faktanya berbanding terbalik, jika dilihat dari intensitas konflik kekerasan bersenjata. Rentang tahun 2018 hingga tahun 2021, eskalasi konflik justru meningkat sekitar 18 kasus sampai dengan 135 kasus (Widjayanto, 2023). Angka-angka kekerasan bersenjata ini tidak mendapat perhatian serius di mata Dunia.

Keenam, *sensasionalisme*. Konflik Papua Barat tergolong sebagai konflik tingkat rendah dimana selama bertahun-tahun para pejuang Papua kebanyakan bersembunyi di hutan yang jauh dari mata publik. Seperti disebutkan sebelumnya, tidak banyak gambar visual mengerikan yang tersebar di media. Laporan dari Gugus Tugas Papua UGM meneliti jumlah korban kasus kekerasan di Papua dan Papua Barat menemukan .....

Temuan tetapi semua ini tidak cukup sensasional untuk memancing tanggapan internasional yang memadai.

Sejarah menunjukkan bahwa orang Papua, sejak zaman kolonial, telah dianggap tidak mampu dan terbelakang. Pandangan ini masih bertahan, orang Indonesia masih menganggap orang Papua sebagai “primitif” dan “terbelakang” (Soukotta, 2019). Hal ini dapat berkontribusi pada rendahnya tingkat dukungan nasional, tanpa dukungan internal lebih sulit bagi orang Papua untuk mencapai

dukungan internasional yang lebih luas. Pandangan rasial dari masyarakat internasional bahwa orang Papua tidak mampu memerintah diri mereka sendiri mungkin menjadi salah satu faktor yang berkontribusi mengapa masalah ini sebagian besar diabaikan secara internasional. Masyarakat internasional percaya bahwa Indonesia telah menangani masyarakat Papua dengan tepat, Undang-Undang Otonomi Khusus (Pratama, 2016) dan kebijakan lainnya dianggap memiliki tujuan mulia yakni untuk menasionalisasi orang Papua, sehingga masyarakat internasional sangat mendukung kebijakan ini.

### **Konflik Papua Barat dan Masyarakat Internasional**

Demi mengetahui lebih lanjut apakah konflik ini diabaikan atau tidak diketahui oleh masyarakat internasional. Penulis melakukan wawancara secara spontan kepada beberapa teman luar negeri penulis, “Apakah anda tahu dimana Papua Barat, apa yang anda ketahui tentang Papua Barat.” Hanya 5 dari 26 orang yang mengetahui bahwa konflik sedang berlangsung di Papua Barat. Sedikitnya 5 orang yang mengetahui eksistensi konflik ini adalah 1 orang Malaysia, 1 orang Nigeria, 1 orang Amerika Serikat (seorang warga Amerika Serikat yang pernah beberapa kali

berkunjung ke Indonesia), 1 orang dari Vietnam, dan 1 orang dari Thailand. Adapun 21 orang lain yang tidak mengetahui eksistensi konflik Papua Barat adalah 4 orang dari Amerika Serikat, 9 orang dari Uni Eropa, 3 orang dari India, 1 orang dari Haiti, 1 orang dari China, 1 orang dari Thailand dan 2 orang dari Palestina. Berdasarkan wawancara ini ternyata konflik Papua Barat ini lebih cenderung ‘tidak diketahui’ daripada ‘terabaikan’.<sup>1</sup>

Terkadang, ketika suatu konflik semakin rumit, ketertarikan masyarakat internasional bisa menjadi rendah karena beberapa alasan: Pertama, kompleksitas informasi: Konflik yang rumit sering kali melibatkan banyak pihak, beragam masalah budaya, sejarah, dan politik lokal yang sulit dipahami oleh masyarakat internasional. Informasi yang rumit dan bervariasi bisa sulit diolah dan dipahami oleh media atau masyarakat umum di luar wilayah tersebut, yang dapat mengurangi minat mereka untuk terlibat. Kedua, kehati-hatian diplomatik: Negara-negara sering kali harus mempertimbangkan hubungan diplomatik dan ekonomi mereka dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ketika konflik semakin rumit, pilihan tindakan bisa lebih sulit dan berisiko tinggi. Negara-negara mungkin enggan campur tangan secara terbuka agar

---

<sup>1</sup> Wawancara dilakukan menggunakan video call pada aplikasi whatsaps dan Wechat tanggal 4 sampai 11 Juni tahun 2023.

tidak memperburuk situasi atau merusak hubungan mereka.

Ketiga, keterbatasan Sumber Daya: Masyarakat internasional memiliki keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun finansial, untuk mengikuti setiap konflik yang terjadi di seluruh dunia. Mereka mungkin harus memilih konflik mana yang akan mereka fokuskan dan upayakan solusinya. Keempat, ketidakpastian Hasil: Konflik yang rumit sering kali tidak memiliki solusi yang jelas atau pasti. Masyarakat internasional mungkin merasa frustrasi karena upaya mereka tidak berbuah hasil yang signifikan atau berkelanjutan, yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk terlibat. Kelima, berbagai Prioritas: Masyarakat internasional memiliki berbagai masalah dan prioritas yang harus diatasi. Mereka mungkin lebih cenderung fokus pada isu-isu global yang dianggap lebih mendesak atau strategis daripada konflik lokal yang kompleks. Keenam, kebijakan non-intervensi: Beberapa negara dan organisasi internasional menganut prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain. Kebijakan non-intervensi, meskipun pada beberapa kasus dapat membuat konflik terabaikan, juga memiliki beberapa argumen yang mendukungnya. Prinsip ini sering kali muncul dari tujuan untuk menghormati kedaulatan negara dan mencegah campur tangan asing yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut atau ancaman terhadap perdamaian global.

Namun, dampak dari kebijakan non-intervensi dapat beragam dan kompleks.

Campur tangan asing dalam konflik sering kali dapat memperburuk situasi dan memicu eskalasi lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, campur tangan asing dapat mengubah konflik lokal menjadi konflik internasional yang lebih luas. Prinsip non-intervensi bisa menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Pihak yang memiliki kekuatan lebih besar dapat memanfaatkan situasi ini untuk menguntungkan diri mereka sendiri, dengan sedikit pertimbangan terhadap kepentingan pihak yang lebih lemah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, konflik Papua Barat cenderung 'tidak diketahui' daripada 'diabaikan.' Penulis juga menemukan bahwa kurangnya kredibilitas mungkin menjadi faktor lain yang berkontribusi terhadap diabaikan konflik Papua Barat oleh masyarakat internasional. Seperti dibahas sebelumnya, kurangnya liputan berita internasional dan gambar visual terkait konflik cenderung berkontribusi terhadap kredibilitas konflik. Terdapat fakta lain dalam forum internasional seringkali para diplomat Indonesia tampak lebih kredibel dalam diskusi dibandingkan perwakilan Papua Barat. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia

telah sangat efektif dalam meyakinkan dunia bahwa Indonesia menangani konflik Papua Barat dengan sebaik mungkin.

Kekuatan aktor dan ketertarikan aktor merupakan penentu utama dalam proses penentuan apakah konflik mendapatkan perhatian atau diabaikan. Kendati terdapat MSG sebagai organisasi yang tertarik pada masalah ini, tetapi kekuatan dari MSG dipertanyakan karena organisasi terdiri dari Negara-negara Kepulauan Pasifik kecil. Sulit bagi MSG untuk menciptakan efek domino sehingga diperlukan masyarakat internasional turut untuk menanggapi masalah Papua Barat secara masif dan serius. Tanpa dukungan dari negara-negara kuat, kecil kemungkinan suara orang Papua dapat didengar. Tulisan ini pada akhirnya juga melahirkan pertanyaan lebih lanjut, apakah bahkan PBB sebagai sebuah organisasi mendapat manfaat dari isu-isu seputar konflik yang tidak disentuh.

## DAFTAR PUSTAKA

- BBC Indonesia. (2019). *Wartawan asing ke Papua dan Papua Barat dibatasi: 'Langkah tak konsisten dan "ketakutan pemerintah."* Bbc.Com/Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49561177>
- Chauvel, R. (2021). West Papua: Indonesia's last regional conflict. *Small Wars & Insurgencies*, 32(6), 913–944.
- CNN Indonesia. (2023). *Mahfud Akui Pemekaran Papua Politis: Ada Gerakan Separatis di Tengah*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230531203830-32-956504/mahfud-akui-pemekaran-papua-politis-ada-gerakan-separatis-di-tengah>
- Elisabeth, A. (2004). *Pemetaan peran & kepentingan para aktor dalam konflik di Papua*. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI,.
- Galtung, J. (2003). Peace Journalism. *Media Asia*, 30(3), 177–180.
- Godschalk, J. A. (2010). Geelvink Bay: Carl Wilhelm Ottow and Johann Gottlob Geissler, A Brief Survey of the Land and People on the Northeast Coast of New Guinea (Mansinam, 29 January 1857). *White on Black: Writings on Oceania, I* (Early Accounts of Melanesian Cultures).
- Gurr, T. R. (1970). Relative deprivation and the impetus to violence. In *Why Men Rebel* (pp. 22–58).
- Hawkins, V. (2016). *Stealth conflicts: How the world's worst violence is ignored*. Routledge.
- Hernawan, J. B. (2005). *Papua, Land of Peace: Addressing Conflict Building Peace in West Papua*. Office for Justice

- and Peace, Catholic Diocese of Jayapura.
- Hutubessy, F. K. (2019). Pergerakan Sakralitas-Nasionalisme Papua: Pola Pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua dalam Ruang Solidaritas di Yogyakarta. *Mozaik Humaiora*, 19, 26–36.
- Indahono, B. (2020). *Fight for freedom: new research to map violence in the forgotten conflict in West Papua*. The Conversation. <https://theconversation.com/fight-for-freedom-new-research-to-map-violence-in-the-forgotten-conflict-in-west-papua-128058>
- King, P. (2006). In Defence of the Papua Sympathisers: A Rejoinder to Ed Aspinall. *Policy and Society*, 25(4), 131–137.
- Krisiandi, D. E. N. (2021). *Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/25/21093041/stafsus-presiden-pembangunan-jalan-trans-papua-capai-3446-kilometer>
- Mahendra, B. (2023). *Connie Bakrie Menduga Tentara Bayaran yang Serang TNI di Papua, Harus Operasi Militer*. RMOL. <https://keamanan.rmolid/read/2023/04/20/571331/connie-bakrie-menduga-tentara-bayaran-yang-serang-tni-di-papua-harus-operasi-militer>
- Pratama, Y. (2016). Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, Peluang, Tantangan, dan Harapan. *Polkam.Id*.
- Purwaningsih, A. (2018). *Papua killings revive forgotten conflict*. DW. <https://www.dw.com/en/papua-killings-revive-debate-on-decades-old-conflict/a-46664456>
- Rizkinaswara, L. (2019). *Leski Rizkinaswara. Pembatasan Akses Internet Di Papua Sesuai Hukum*. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/pembatasan-akses-internet-di-papua-sesuai-dengan-dasar-hukum/>
- Soukotta, T. (2019). Kolonialisme dan Rasisme: Fondasi Sikap Indonesia terhadap Papua. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/kolonialisme-dan-rasisme-fondasi-sikap-indonesia-terhadap-papua-eg6e>
- Sumule, A. (2004). *Protection and Empowerment of the Rights of Indigenous People of Papua (Irian Jaya) Over Natural Resources under Special Autonomy: from legal opportunities to the challenge of implementation* (Resource Management in Asia-Pacific Working Paper No. 36). Resource Management in Asia-Pacific Program, Division of Pacific and Asian History.
- Sutrisno, E. (2020). *Tujuh Jalan Menuju*

- Percepatan Pembangunan Papua.*  
Indonesia.Go.Id.  
<https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/tujuh-jalan-menuju-percepatan-pembangunan-papua>
- The Guardian. (2019). *Freedom of the press in Indonesian-occupied West Papua.*  
Theguardian.Com.  
<https://www.theguardian.com/media/2019/jul/22/freedom-of-the-press-in-indonesian-occupied-west-papua>
- Viartasiwi, N. (2013). The prospect of mediation in West Papua-Indonesia Conflict transformation. 立命館国際研究, 26, 2.
- Wibowo, T. H. (2005). *The emergence of Papuan Tribal Governance: A case study of societal knowledge creation.* Japan Advance Institute of Science and Technology.
- Widjayanto, A. (2023). *Pola Kekerasan di Papua.*
- Widodo, N. K. A. U. P. (2023). Menilik Politisasi Konflik Papua : Dilema Isu Keamanan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Wonda, S., & Yoman, S. S. (2009). *Jeritan bangsa: rakyat Papua Barat mencari keadilan* (J. F. Tualaka (ed.)). Galangpress.
- Wright, C. W. G. J. S. M. W. N. (2020). *Fight for Freedom: New Research to Map Violence in the Forgotten Conflict in West Papua.* The Jakarta Post.  
<https://www.thejakartapost.com/academia/2020/05/23/fight-for-freedom-new-research-to-map-violence-in-the-forgotten-conflict-in-west-papua.html>